ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.3, No.1, Desember 2023

Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Ade Gunawan[1], M. Arif Surham[2], Muhammad Syaifuddin[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: adegunawan080700@gmail.com[1], arifsurham@gmail.com[2], muhammadsyaifudin74@gmail.com[3]

Article History:
Received: 25 November 2023
Revised: 01 Desember 2023
Accepted: 03 Desember 2023

Keywords: *Evaluasi, Kebijakan, Pendidikan*

Abstract: *Pendidikan selalu berubah dan berkembang mengikuti kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Sebuah proses pelaksanaan kebijakan pendidikan menjadi solusi untuk bisa memperbaiki pendidikan saat ini yang sering berubah-ubah kebijakannya. Maka daripada itu evaluasi kebijakan pendidikan sangat diperlukan dan harus mendapat perhatian yang khusus. . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan evaluasi kebijakan pendidikan, mulai dari konsep dasar evaluasi kebijakan pendidikan, tujuan dan fungsi evaluasi kebijakan pendidikan, manfaat evaluasi kebijakan pendidikan, permasalahan dalam evaluasi kebijakan pendidikan, model dan pendekatan evaluasi kebijakan pendidikan, langkah dan dampak evaluasi kebijakan pendidikan dan monitoring evaluasi kebijakan pendidikan. Sepanjang pekerjaan ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dari penelitian studi kepustakaan bersumber dari buku serta jurnal yang relevan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa evaluasi kebijakan pendidikan memiliki aktivitas yang dijalankan pada pelaksanaan sebuah kebijakan supaya dapat mengetahui apakah kebijakan itu terselenggara secara baik atau tidak, mengetahui kekuranggan serta keunggulan kebijakan tersebut dan mengetahui seberapa jauh kebijakan itu dilaksanakan. Maka daripada itu evaluasi dilakukan untuk menyempurnakan kebijakan pendidikan. Maka sangat penting di dalam pendidikan dilakukan sebuah evaluasi dan perbaikan sehingga bisa mengukur sejauhmana pelaksanaan pendidikan itu berjalan secara baik atau tidak, dan bisa mengetahui kendala yang di alami, sehingga dilakukan perbaikan dan evaluasi.*

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan Indonesia sebenarnya menempati posisi sentral dalam upaya kemajuan nasional Indonesia. Jika pemerintah Indonesia tidak bisa merumuskan kebijakan yang unggul di bidang pendidikan, maka kehidupan masyarakat Indonesia akan dirugikan.

Kebijakan pendidikan yang buruk akan mempunyai konsekuensi jangka panjang. Indonesia unggul hanya jika kebijakan yang dihasilkan merupakan kebijakan yang unggul dan pasti dapat dilaksanakan. Kebijakan pendidikan merupakan salah satu kebijakan nasional khususnya

pendidikan, di samping kebijakan lain seperti kebijakan ekonomi, politik, pertahanan, dan agama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan subsistem dari keseluruhan kebijakan nasional atau pemerintah (Hasbullah, 2016).

Pertanyaan utama yang perlu dihadapi adalah apakah kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik atau kebijakan pendidikan publik. Persoalan ini penting karena berkaitan dengan positioning pendidikan pada sektor publik dan harus dikelola secara hati-hati dan sangat mendesak oleh pemerintah dalam menetapkan prioritas program pembangunan pendidikan (Bakry, 2010). Reformasi di bidang pendidikan harus dipahami sebagai upaya umat manusia untuk melepaskan diri dari segala keterbelakangan dan kebodohan. Di luar itu, kebijakan pendidikan merupakan cara manusia memahami dirinya dalam konteks kemanusiaan dan upaya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah melalui kacamata kemanusiaan.

Pendidikan harus mampu merangsang manusia untuk memanfaatkan potensinya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan pendidikan materiil harus mampu memberikan pengetahuan yang memajukan dan meningkatkan kualitas hidup pada tingkat individu, sosial, dan nasional. Bagi masyarakat Indonesia, permasalahan di bidang pendidikan tentu saja menjadi salah satu agenda yang sangat penting. Kesadaran ini mengharuskan pemerintah untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi warganya. Namun jika dicermati kasus ini, kita melihat adanya kesenjangan antara tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan sebanyak-banyaknya dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakannya. Menyadari keterbatasan masyarakat Indonesia, pemerintah memberikan kesempatan yang sangat baik bagi setiap individu dan kelompok untuk berpartisipasi dalam mengatasi kesenjangan pendidikan Melalui evaluasi kebijakan pendidikan, Indonesia bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikannya. Agar pelaksanaan pendidikan dapat melampaui upaya-upaya sebelumnya, penting untuk menilai kebijakan-kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sejalan dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan untuk menjamin kepatuhan terhadap kriteria yang telah ditentukan dan memberikan dampak perubahan nyata bagi penerima manfaat program (Arwildanyanto, Sukin, dan Sumar, 2018). Mengevaluasi kebijakan pendidikan adalah salah satu cara untuk memastikan apakah suatu kebijakan benar-benar dapat memberikan manfaat bagi khalayak yang dituju. Hal ini merupakan cara untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat suatu kebijakan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan sebelumnya.

Evaluasi memainkan peran penting dalam pendidikan, sehingga guru harus memiliki kompetensi tingkat tinggi baik dalam merancang rencana pembelajaran yang efektif, maupun mengembangkan penguasaan mereka sendiri terhadap materi yang diajarkan. Namun keahlian seorang guru di kelas tidaklah cukup tanpa juga mampu mengevaluasi kompetensi siswa secara kompeten dalam kaitannya dengan perencanaan selanjutnya dan pelaksanaan kebijakan mengenai konsep pembelajaran yang utuh (Purwanto, 2009).

Evaluasi di bidang pendidikan dapat ditafsirkan sebagai tindakan atau proses yang bertujuan untuk memastikan nilai yang terkait dengan ranah pendidikan. Dalam bidang pendidikan Islam, evaluasi dapat dibatasi sebagai upaya untuk menentukan perkembangan tugas dalam proses pedagogis Islam dalam lingkup terbatas. Evaluasi dilakukan untuk membedakan sejauh mana keberhasilan pendidik dalam menyebarluaskan materi pendidikan Islam kepada peserta didik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 27 Ayat 1, evaluasi dilakukan dalam konteks pengendalian mutu pendidikan nasional sebagai sarana untuk meminta pertanggungjawaban penyelenggara pendidikan kepada para pemangku kepentingan terkait, termasuk siswa, lembaga pendidikan, dan program.

Evaluasi pendidikan sangat menguntungkan bagi siswa dan peserta pendidikan, serta guru

dan administrator. Melalui evaluasi di ranah pendidikan, peserta didik dapat memastikan tonggak pencapaian yang telah dicapai sepanjang proses pembelajaran di sekolah. Dalam kasus di mana siswa menerima nilai yang memuaskan, itu akan memiliki efek konsekuensial dalam bentuk stimulus, berfungsi sebagai motivator bagi siswa untuk lebih meningkatkan prestasi mereka. Dalam kasus di mana hasil yang dicapai tidak memuaskan, siswa akan berusaha untuk meningkatkan upaya pendidikan mereka, namun tetap penting untuk memberikan stimulus dan motivasi positif sebagai sumber dorongan dari guru atau instruktur, untuk mencegah siswa mengalami keputusasaan. Dari perspektif pendidik, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik untuk membangun inisiatif yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan.

METODE PENELITIAN

Dalam karya ini, kami menggunakan teknik *literature review to (library research).* Untuk menulis tentang suatu topik dalam sains, seseorang dapat menggunakan pendekatan penulisan studi literatur, yang melibatkan karya konsultasi seperti buku dan jurnal ilmiah. Metode ilmiah, teori, kajian filosofis (pendekatan filosofis), literatur, dan dokumen yang sudah ada sebelumnya yang dikumpulkan di perpustakaan semuanya berperan dalam penelitian kepustakaan (Zed, 2008) . Penelitian perpustakaan memerlukan tiga tahap: menemukan dan mengevaluasi sumber daya yang berpotensi bermanfaat; mensintesis dan mengkomunikasikan temuan analisis itu; dan terakhir, merevisi dan merevisi lagi (Bungin, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan pendidikan adalah upaya yang bertujuan untuk memastikan apakah kebijakan pendidikan tertentu mematuhi kriteria yang ditetapkan dan memiliki dampak yang diinginkan pada audiens target. Proses evaluasi ini dilakukan melalui penerapan analisis kebijakan, dalam rangka menentukan kemanjuran kebijakan pendidikan dan potensinya untuk keberhasilan implementasi. Dengan mengevaluasi kebijakan pendidikan, seseorang dapat mengidentifikasi keterbatasan dan kelebihannya dalam praktiknya.

Kegiatan evaluasi mewakili puncak dari proses pembuatan kebijakan, menawarkan wawasan berharga untuk lebih menyempurnakan kebijakan pendidikan. Biasanya, evaluasi kebijakan pendidikan adalah proses berurutan yang berfungsi sebagai tahap akhir dalam analisis kebijakan tersebut (Winarno, 2008). Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa evaluasi kebijakan pendidikan belum tentu merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan, karena juga dapat dilakukan selama tahap analisis, terutama ketika kebijakan gagal memenuhi harapan yang diinginkan atau gagal mencapai hasil yang diinginkan.

Untuk memastikan penilaian kebijakan pendidikan yang komprehensif, menjadi penting untuk menyajikan banyak pembenaran logis. Ini termasuk: a) membedakan kelayakan penerapan kebijakan yang dirancang selama perumusannya, b) mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang dirumuskan, c) menetapkan korelasi antara pro dan kontra perumusan kebijakan dengan faktor kontekstual dan tidak langsung yang mempengaruhi pengambilan keputusan, d) menentukan sejauh mana formulasi kebijakan pendidikan telah diterapkan secara efektif, e) memastikan kemanjuran dan ketidakpastian seputar kebijakan pendidikan, f) menganalisis dampak sosial dari pendidikan kebijakan pada masyarakat umum, g) menangani kecukupan strategi mitigasi risiko yang diterapkan selama perumusan kebijakan, dan h) menguraikan langkah-langkah untuk peningkatan kebijakan pendidikan selanjutnya.

Untuk mendapatkan kesimpulan yang koheren dari pertimbangan ini dan mengevaluasi

kebijakan pendidikan secara efektif, sangat penting untuk mendorong koordinasi dan komunikasi yang intensif di antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat Penilaian kebijakan pendidikan mencakup berbagai aktor. *Pertama*, ada aktor formal yang memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan dan memastikan implementasinya. Aktor-aktor ini termasuk pembuat kebijakan, seperti legislator, serta pelaksana kebijakan dan administrator di berbagai tingkat pemerintahan. Mereka bertindak sebagai kekuatan pendorong di balik inisiatif pendidikan. *Kedua*, ada aktor non-formal yang juga memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan pendidikan. Aktor-aktor ini terdiri dari administrator dan anggota partai-parpol, yang membawa perspektif dan prioritas mereka sendiri ke meja. Selain itu, organisasi waktu, kelompok kepentingan, dan kelompok perantara semuanya berkontribusi pada wacana seputar kebijakan pendidikan.

Selain itu, mitra pelaksana kebijakan, tokoh individu, media massa, dan lembaga yang terlibat dalam organisasi pendidikan semuanya memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan. Misalnya, di Indonesia, ada organisasi seperti Muhammadiyah, NU, dan yayasan pendidikan yang aktif berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan. Bersama-sama, aktor-aktor yang beragam ini bekerja secara kolaboratif untuk membentuk kebijakan pendidikan dan memastikan implementasinya yang efektif.

Fungsi dan Tujuan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Tindakan menilai kebijakan pendidikan dalam skala luas berfungsi sebagai masukan untuk pembuatan kebijakan baru dengan tujuan menghasilkan kebijakan pendidikan yang lebih luar biasa (Wirawan, 2011). Mengenai penggambaran tujuan evaluasi kebijakan pendidikan, antara lain, poin-poin berikut termasuk:

1. Dampak program terhadap individu, seperti penyediaan pendidikan gratis, harus dipahami untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi masyarakat.
2. Apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dirancang.
3. Apakah implementasi program sejalan dengan tolok ukur yang ditetapkan.
4. Mendeteksi dan memastikan sejauh mana program telah diteliti.
5. Kemajuan personel yang melaksanakan program pendidikan.
6. Kesesuaian dengan peraturan dan hasil.

Evaluasi kebijakan berfungsi sebagai sarana untuk menyelidiki elemen-elemen yang berkontribusi terhadap jatuhnya kebijakan atau untuk mengungkap kebijakan pendidikan yang saat ini sedang dilaksanakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Dalam hal ini, penilaian kebijakan pendidikan dapat mengasah tiga komponen penting.

1. Aspek administrasi, yang memerlukan pengukuran prosedur kebijakan pendidikan yang cermat, cenderung menempatkan penekanan yang lebih besar pada dimensi keuangan.
2. Aspek yudisial memerlukan pengukuran kepatuhan terhadap objek hukum, membedakan apakah mereka dilanggar atau ditegakkan.
3. Dimensi politik meliputi pengukuran pertimbangan politik yang mempengaruhi tindakan kebijakan.

Tujuan mengevaluasi kebijakan pendidikan beraneka segi. Subarsono (2013) menyarankan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk:

1. Memastikan tingkat kinerja suatu kebijakan, dengan demikian mengungkap sejauh mana tujuannya tercapai.
2. Mengukur tingkat efisiensi dalam suatu kebijakan.

Manfaat Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Keuntungan menilai kebijakan pendidikan dapat dikategorikan menjadi dua perspektif, internal dan eksternal. Dimensi internal melayani pihak-pihak yang terlibat langsung dalam merumuskan atau menerapkan kebijakan, dan manfaat yang diperoleh meliputi:

1. Memastikan pemahaman yang komprehensif tentang keberhasilan kebijakan, sehingga memperoleh panduan melalui evaluasi yang menentukan apakah tujuan telah tercapai atau tidak.
2. Menilai kemanjuran suatu kebijakan dengan mengukur kemampuannya untuk mencapai keberhasilan atau gagal.
3. Mencegah pengulangan kesalahan dalam informasi yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan yang memadai, menawarkan indikasi untuk menghindari terulangnya kesalahan kebijakan yang sama atau lainnya dari waktu ke waktu. (Lukitasari dkk., 2017).

Dimensi eksternal berkaitan dengan entitas yang tidak terlibat langsung dalam perumusan atau pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, mereka memiliki kesempatan untuk menuai hasil dari menilai kebijakan pendidikan, yang meliputi:

1. Mengikuti prinsip akuntabilitas publik mengharuskan meneliti kemanjuran kebijakan yang ditetapkan, dengan satu aspek adalah kewajiban pembuat kebijakan untuk menjawab kepada publik, terlepas dari keterlibatan mereka.
2. Untuk menyebarluaskan manfaat kebijakan secara efektif, terutama kepada kelompok sasaran dan penerima manfaat tertentu, sangat penting untuk melakukannya dengan cara yang dapat diukur (Jaysurrohman dkk., 2021).

Permasalahan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Robit Azam Jaysurrohman dkk (2021) dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan pendidikan, tidak terlepas dari berbagai masalah-masalah atau kendala yang sering dihadapi, diantaranya:

1. Ketidakjelasan tujuan kebijakan disebabkan oleh adanya kompromi yang dipaksakan pada langkah pertama pembuatan kebijakan
2. Cepatnya perkembangan masyarakat, menyulitkan evaluasi kebijakan, karena sering kali masalah yang diselesaikan saat ini, tidak relevan lagi dengan masa yang akan datang. Bahkan di depannya sudah menimbulkan masalah yang baru lebih rumit dan komplek
3. Adanya hubungan masalah satu dengan yang lainya yang membutuhkan pemecahan yang sama,
4. Subjektivitas masalah dari sudut pandang orang yang berbeda dimana mereka mempunyai persepsi yang berbeda mengenai solusi masalah kebijakan
5. Kendala psikologis, dari aktor pelaksana kegiatan, memandang evaluasi kebijakan berkaitan dengan prestasi dirinya. Hal ini menghambat karir mereka ke depannya, apalagi bagi mereka yang nyaman dengan kondisi yang ada
6. Kendala ekonomis, sedikit, seperti biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data, biaya untuk para staf administrasi, dan biaya untuk evaluator. Proses evaluasi kebijakan pendidikan akan mengalami hambatan apabila tanpa dukungan *financial* dari lembaga pendidikan,
7. Kurang tersedianya cukup data dan informasi yang *up to date*, disebabkan data yang ada kualitasnya kurang baik, dan suplay data dipandang sebagai pekerjaan rutin dan formalitas tanpa memperhitungkan substansinya
8. Kendala politis, sering terbentur dan bahkan gagal karena masing-masing kelompok saling menutupi kelemahan dari implementasi suatu program dikarenakan ada *deal* atau *bargaining* politik

9. Kurang tersedianya *evaluator* atau sumber daya evaluasi kebijakan pendidikan.

Masalah lainnya dalam evaluasi kebijakan pendidikan, berkenaan dengan pengukuran (*measurement*), menyangkut pada penggunaan konsep tertentu sebagai suatu alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu program. Disamping Kelompok sasaran (*target group*s), yang perlu diperhatikan adalah program meskipun berdampak pada keseluruhan populasi sasaran, tetapi belum tentu memiliki dampak terhadap kelompok sasaran. Seringkali terjadi justru bukan kelompok sasaran yang memperoleh manfaat dari kebijakan itu, tetapi kelompok lain dalam populasi tersebut, yang kadang disebabkan *bias birokras* (Ali, M, 2017).

Model dan Pendekatan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Model evaluasi kebijakan dalam bidang pendidikan bisa mengadopsi pendekatan yang digunakan dalam evaluasi kebijakan publik, ada beberapa model yang bisa diterapkan atau untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan, antara lain:1) *goal oriented evaluation model*, dikembangkan oleh Tyler, Objek dari model ini adalah tujuan dari program yang ditetapkan sebelum program berjalan dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, 2) *goal free evaluation model*, dikembangkan oleh Scriven, Model ini berlawanan dengan model pertama atau bisa dikatakan evaluasi lepas dari tuuan khusus. Sebab, menurut Scriven yang perlu diperhatikan adalah penampilan dari tiap langkah program. Model ini mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai oleh program, bukan penilaian secara rinci, 3) *formatif-sumatif evaluation model*, dikembangkan oleh Michael Scriven, 4) *countenance evaluation model* , dikembangkan oleh Stake, 5) *responsive evaluation model*, dikembangkan oleh Stake, 6) CSE-UCLA *Evaluation Model*, menekankan pada "kapan" evaluasi dilakukan, 7) CIPP *Evaluation Model*, yang dikembangkan oleh Stufflebeam, 8) *discrepancy model*, yang dikembangkan Provus (Naila Nur Azizah, dkk, 2023).

William N Dunn (2003) dalam melaksanakan berbagai model evaluasi kebijakan pendidikan di atas, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan, antara lain:

1. Evaluasi semu *(pseudo evaluation)*, maksudnya dalam melaksanakan evaluasi kebijakan pendidikan dapat menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan di bidang pendidikan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijkaan pendidikan tersebut pada individu, kelompok atau masyarakat. Asumsi yang digunakan adalah ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial,
2. Evaluasi formal, maksudnya pendekatan yang bisa digunakan untuk kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan pendidikan itu sendiri. Asumsinya adalah sasaran dan target yang ditetapkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai dari program dan kebijakan pendidikan,
3. Evaluasi keputusan teoritis, maksudnya pendekatan evaluasi kebijakan pendidikan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi tentang pendidikan yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan pendidikan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholder pendidikan. Dalam hal ini, evaluasi keputusan teoritik berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para stakeholder pendidikan.

Langkah dan Dampak Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Budi Winarno (2012) dalam melaksanakan evaluasi kebijakan pendidikan, ada beberapa langkah yang bisa diikuti, antara lain:

1. Mengidentifikasi tujuan evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyan, antara lain a) apa hakikat dan tujuan evaluasi pendidikan, b) siapa target dari evaluasi pendidikan itu, c) kapan target dari perubahan kebijakan pendidikan yang di inginkan,
2. Analisis terhadap masalah pendidikan,
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan,
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan dari evaluasi dilakukan,
5. Menentukan apakah perubahan yang dievaluasi merupakan akibat dari kegiatan evaluasi atau karena penyebab faktor lainnya.

Dari langkah-langkah evaluasi kebijakan pendidikan, kita bisa mengukur dampak (*evaluation of impact*) kebijakan pendidikan yang berbeda dengan evaluasi implementasi kebijakan pendidikan. Evaluasi dampak kebijakan pendidikan dapat dilakukan secara memuaskan bila program atau proses evaluasi kebijakan pendidikan telah dilaksanakan secara lengkap dan berjalan dalam kurun waktu sesuai dengan rencana. Kebijakan pendidikan dapat dilihat dampak bila sudah diimplementasikan dalam masyarakat atau pada objeknya. Dampak atau hasil-hasil kebijakan pendidikan memiliki makna atau arti yang berlainan. Pemberian arti sangat tergantung siapa aktor yang menafsirkan arti dampak tersebut sesuai dengan latar belakang kepentingannya. Secara konseptual, dampak kebijakan pendidikan dicari dengan pertanyaan, apa yang telah dicapai dari kebijakan pendidikan?

Evaluasi dampak kebijakan pendidikan sering bersifat *ilmiah* dan cenderung mengabaikan realitas. Akibatnya muncul beberapa mengandung kelemahan, antara lain Indikator evaluasi kebijakan pendidikan yang baik yang dilakukan itu dengan memperhatikan, antara lain; 1) efektivitas. apakah hasil yang dinginkan telah tercapai, 2) kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah pendidikan yang di evaluasi, 3) pemerataan, apakah biaya dan manfaat layanan pendidikan itu didistribusikan merata kepada seluruh kelompok masyarakat yang berbeda, 4) responsivitas. apakah hasil kebijakan pendidikan memuat preferensi atau nilai kelompok terkait (*stakeholder*) dapat memuaskan mereka, dan 5) ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat dari evaluasi pendidikan yang dilakukan.

Evaluasi kinerja kebijakan dilakukan untuk menilai hasil yang dicapai oleh suatu kebijakan setelah dilaksanakan. Hasil yang dicapai dapat diukur dalam ukuran jangka pendek atau *output*, jangka panjang atau *outcome*. Evaluasi kinerja kebijakan pendidikan dengan melakukan penilaian komprehensif terahadap:

1. Pencapain target (*output*),
2. Pencapai tujuan kebijakan (*outcome*),
3. Kesenjangan (*gap*) antar target dan tujuan dengan pencapaian,
4. Perbandingan (*benchmarking*) dengan kebijakan yang sama di tempat lain yang berhasil,
5. Indentifikasi faktor pendukung keberhasilan dan kegagalan sehingga menyebabkan kesenjangan, dan
6. Memberikan rekomendasi untuk menanggulangi kesenjangan.

Subarsono (2013) adapun kendala evaluasi kebijakan Pendidikan, antara lain:

1. Kendala psikologis, banyak aparat pemerintah masih alergi terhadap kegiatan evaluasi, karena dipandang berkaitan dengan prestasi dirinya. Apabila hasil evaluasi menunjukkan kurang baik, bisa jadi akan menghambat karir mereka. Sehingga banyak aparat memandang kegiatan

evaluasi bukan merupakan bagian penting dari proses kebijkana publik. Evaluasi hanya dipahami sebagai kegiatan tambahan yang boleh dilakukan boleh tidak,
2. Kendala ekonomis, kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data, biaya untuk para staff administrasi, dan biaya untuk evaluator. Proses evaluasi akan mengalami hambatan apabila tanpa dukungan finansial,
3. Kendala teknis, evaluator sering dihadapkan pada masalah tidak tersedianya cukup data dan informasi yang up to date. Disamping itu, data yang ada kualitasnya kurang baik, karena *suplay data* kepada suatu instansi yang lebih tinggi dari instansi yang lebih rendah hanya dipandang sebagai pekerjaan rutin dan formalitas tanpa memperhitungkan substansinya,
4. Kendala politis. evaluasi sering terbentur dan bahkan gagal karena alasan politis. Masing-masing kelompok bisa jadi saling menutupi kelemahan dari implementasi sutau program dikarenakan ada deal atau bargaining politik tertentu,
5. Kurang tersedianya evaluator yang dilakukan saat ini.

Monitoring Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Pada pengamatan penilaian program, ada upaya untuk mengumpulkan informasi dengan tujuan memasok manajer program dan pemangku kepentingan dengan indikasi awal kemajuan dan kekurangan implementasi program dalam konteks peningkatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan program. Pemantauan berfungsi sebagai upaya untuk memastikan apakah program yang ditetapkan dapat berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi hambatan yang mungkin timbul dan mengeksplorasi strategi yang digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengatasinya. Pemantauan hasil perencanaan yang berkelanjutan memastikan bahwa alat tetap di bawah pengawasan yang cermat selama proses implementasi (Wirawan, 2011).

Dalam bidang evaluasi kebijakan, pendidikan memiliki hubungan nyata dengan kebijakan, di mana ia menelusuri kembali langkahnya untuk merefleksikan sesuatu yang telah diciptakan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia memerlukan pendekatan yang tepat dari pemerintah, yang memerlukan perumusan kebijakan yang berakar pada arah dan tujuan yang jelas. Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia di bidang pendidikan melampaui undang-undang semata. Kebijakan pendidikan mencakup keseluruhan proses dan hasil yang berasal dari pengembangan langkah-langkah strategis yang selaras dengan visi dan misi pendidikan, semua dalam mengejar mewujudkan tujuan pendidikan dalam masyarakat tertentu untuk era tertentu (Nasihi & Hapsari, 2022).

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pengawasan yang cermat untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pendidikan berjalan sebagaimana dimaksud, selaras dengan pedoman yang ditentukan dan strategi program. Pengawasan ini memastikan bahwa data terkait disampaikan kepada manajer program, menawarkan wawasan tentang hambatan, penyimpangan, atau beragam faktor yang dihadapi selama proses evaluasi. Pada dasarnya, pemantauan adalah upaya berkelanjutan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan itu sendiri, memastikan kemenangannya dan realisasi pencapaian yang telah ditentukan.

KESIMPULAN

Evaluasi adalah puncak artistik dari proses kebijakan, di mana ia menghasilkan wawasan berharga untuk menyempurnakan kebijakan pendidikan. Evaluasi kebijakan Pendidikan berfungsi sebagai instrumen ahli untuk perolehan dan pengelolaan pengetahuan yang berkaitan dengan program atau layanan yang telah dilaksanakan. Evaluasi melibatkan serangkaian kegiatan menawan yang menyelidiki seluk-beluk implementasi kebijakan, mengungkap permadani

efektivitasnya dan membedakan kekuatan dan ketidaksempurnaannya yang luar biasa. Ini berfungsi sebagai akhir dari perjalanan pembuatan kebijakan yang menggugah pikiran, mencerahkan kita dengan saran mendalam untuk peningkatan kebijakan atau dimulainya kebijakan berikutnya.

DAFTAR REFERENSI

Azizah, Naila Nur dkk. (2023). Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Ta'lim Jurnal: Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam.* (2)2.

Arwildayanto, dkk. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*, Bandung: CV Cendekia Press.

Bakri, Aminuddin. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. Jurnal: *Medtek.* (2)1.

Burhan, Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Kencana.

Dunn, N William. (2016). *Pegantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Fattah, Nanang (2014). *Analisis Kebijakan Pendidikan.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Hasbullah. (2016). *Kebijakan Pendidikan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jaysurrohman, Robit Azam dkk. (2021). Problematika Dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *BINTANG: Jurnal Pendidikan dan Sains*. (3)2

Kawengian. (2012). Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perampuan dan Anak Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal: *Acta Diurna. (*4)5.

Lukitasari dkk. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi, Jurnal: *Manajemen Pendidikan.* (4)2.

Ruswati, Lutpiah. (2013). Evaluasi Dampak Kebijakan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Kabupaten Sumbawa Barat. Jurnal: *Evaluasi Pendidikan.* (1)1.

M, Ali. (2017). *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia.* Universitas Brawijaya Press.

Nasihi, Achmad dan Hapsari. (2022). Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan, Jurnal: *Indonesian Journal of Teaching and Learning.* (1)1.

Prabowo, Rizky. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendidikan. Jurnal: *Impresi Indonesia.* (1)8.

Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Safrial, Ridho dkk. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendidikan, Jurnal: *Edu Manage Manajemen Pendidikan Islam.* (1)1

Winarno, Budi. (2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Media Premindo.

Wirawan. (2011). *Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka.